

Media Online	Jateng.antaranews.com
Tanggal	08 Agustus 2023
Wilayah	Kabupaten Kudus, Demak, Jepara



Penyaluran DAU KPPN Kudus capai Rp1,56 triliun

<https://jateng.antaranews.com/berita/502917/penyaluran-dau-kppn-kudus-capai-rp156-triliun>

Kudus (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kudus, Jawa Tengah, mencatat realisasi penyaluran dana alokasi umum (DAU) di tiga kabupaten selama Januari hingga 3 Agustus 2023 mencapai Rp1,56 triliun atau 59,25 persen dari alokasi sebesar Rp2,63 triliun.

"Dari tiga kabupaten mulai dari Kabupaten Kudus, Jepara, dan Demak penyalurannya bervariasi," kata Kepala KPPN Kudus Muhammad Agus Lukman Hakim di Kudus, Selasa.

Ia mengungkapkan DAU yang dikelola KPPN Kudus tahun 2023 sebesar Rp2,628 triliun, terdiri dari DAU specific grant dan DAU block grant.

DAU merupakan salah satu bagian alokasi transfer keuangan daerah selain dari Dana Bagi Hasil (DBH), DAK Fisik dan Non-Fisik, Insentif Fiskal, serta Dana Desa. DAU juga berperan penting bagi pemerintah daerah karena memiliki porsi terbesar di antara unsur transfer keuangan daerah yang lain.

Alokasi DAU tahun anggaran 2023 dihitung dengan lebih mencerminkan kebutuhan fiskal dan potensi pendapatan daerah.

Sementara pagu anggaran yang diterima Kabupaten Jepara sebesar Rp964,59 miliar, Kabupaten Kudus sebesar Rp773,66 miliar, dan Kabupaten Demak sebesar Rp890,13 miliar.

Pada DAU Block Grant atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, daerah diberi keleluasaan dalam memanfaatkannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Kabupaten Jepara yang mendapatkan alokasi blok grant Rp801,85 miliar hingga semester pertama terealisasi Rp467,74 miliar atau 58,33 persen, Kabupaten Kudus dengan pagu Rp679,91 miliar terealisasi Rp396,61 miliar atau 58,33 persen, dan Kabupaten Demak dengan pagu Rp723,26 miliar terealisasi Rp421,9 miliar atau 58,33 persen.

Sementara alokasi DAU specific grant untuk Kabupaten Demak sebesar Rp166,86 miliar, Kabupaten Kudus sebesar Rp93,75 miliar, dan Kabupaten Jepara sebesar Rp162,75 miliar.

Pemanfaatan DAU specific grant ditentukan, yakni digunakan untuk kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar. Di antaranya digunakan untuk bidang PPPK, bidang pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan dan kelurahan.

Untuk realisasi DAU specific grant dari masing-masing kabupaten untuk masing-masing bidang paling tinggi 50 persen dan terendah 24,08 persen.